

Daftar Pustaka

Buku / Literatur

- H.S, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada
- Lubis, M.Solly, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah daerah*, Alumi Bandung
- L.J, Van Aperldon, *inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Reht, (diterjemahkan: Oetarid Sadino)*, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1980, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakt
- D. Brotowijoyo, Mukayat, Tribawono, Djoko, dan Mulbyantoro, Eko, *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, Yogyakarta: Liberty
- Abdurahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press
- Gaffar Karim, Abdul 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Soehino, 2008, Cet.II, *Hukum Tata Negara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Liberty
- Abdullah, Rozali, 2002, *Pelaksanaan Otonomi luas dan isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik Pembentukan*, Yogyakarta: Kanisius
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007, *Desentralisasi di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press dan Red Post Press

Skripsi/Tesis

Kusuma, Wardana Bagus, 2014, *Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Muara Enim*” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Arabia, 2013, *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

Seminar dan Rapat Koordinasi

Hendaryanto, 22 Juni 2016, *Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah*, disampaikan dalam FGD “Kebijakan Perikizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”, Jakarta

Rakor Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Pertambangan di Jawa tengah, Semarang, 19 April 2017 “Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah “

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Perambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031

Internet

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, “Letak Geografis”,

<http://www.banjarnegarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 2 April 2018.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, “Pertambangan Banjarnegara Terus Buka

Peluang Bagi Investor Bidang Tambang”,

<http://www.banjarnegarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 2 April 2018.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, “Upaya Mengatasi Permasalahan

Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjarnegara (Khususnya di DAS Sungai

Serayu)”, <http://www.banjarnegarakab.go.id/>, diakses tanggal 2 April 2018

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, “Daftar daerah aliran

sungai (das) per wilayah sungai (ws) di Jawa Tengah”,

<http://psda.jatengprov.go.id/>, diakses pada tanggal 6 April 2018

Kemertian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Capaian Sub Sektor Mineral dan

Batu Bara Tahun 2017 Outlook 2018”, <https://www.minerba.esdm.go.id/>

[id/media-center/arsip-berita/](https://www.minerba.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/), yang diakses tanggal 29 juli 2018

Radar Banyumas, “Penambangan Pasir Timbulkan Cekungan Besar”,

<http://radarbanyumas.co.id/penambangan-pasir-timbulkan-cekungan-besar/>,

diakses pada tanggal 6 April 2018